

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan Pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian misalkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau bangunan seiring bertambahnya penduduk di setiap daerah. Selain pembangunan pemukiman terdapat pula pembangunan fasilitas-fasilitas publik lainnya guna memenuhi kebutuhan penduduk serta sebagai faktor pendukung perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian hampir terjadi di setiap daerah (Nawangwulan. et al, 2013).

Lahan merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang kebutuhan manusia. Lahan memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai tempat untuk bercocok tanam. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian dari tahun ketahun semakin bertambah dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan struktur ekonomi. Dengan bertambahnya populasi, maka hunian atau tempat tinggal juga akan bertambah dengan seiring waktu berjalan. Selain itu, dibutuhkan juga berbagai fasilitas untuk menunjang kehidupan manusia yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya, seperti pemukiman atau tempat tinggal, pusat perdagangan, industri dan pembangunan fasilitas lainnya.

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki wilayah pertanian yang paling luas di Provinsi D.I Yogyakarta. Menurut BPS D.I. Yogyakarta luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 mencapai 22.642 Ha sedangkan pada tahun 2016 mencapai 21.841 Ha. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman ini mengalami penurunan sebesar 801 Ha. Hal ini terjadi karena perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman telah mengakibatkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan. Lokasi Kabupaten Sleman yang memiliki potensi yang cukup luas dalam bidang *study* dan pariwisata menyebabkan wilayah ini mempunyai nilai sewa lahan untuk sektor non pertanian yang besar.

Pada sektor pertanian lahan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produksi pertanian. Tetapi penurunan produksi juga dapat diakibatkan dari beberapa hal yaitu, kondisi iklim, hama penyakit, bencana alam dll. Tetapi hal itu bersifat sementara dan tidak terjadi secara permanen, berbeda dengan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi secara permanen. Alih fungsi lahan ini dapat mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang terjadi selama ini di Indonesia sebenarnya tidak menguntungkan bagi sektor pertanian. Adanya alih fungsi lahan justru menimbulkan dampak negatif karena dapat menurunkan hasil produksi pertanian dan daya serap tenaga kerja sehingga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup petani. Namun, potensi dampak yang akan terjadi kurang diperhatikan masyarakat ataupun pemerintah dan

upaya untuk pengendalian terhadap alih fungsi lahan sepertinya diabaikan. Inilah yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah dan masyarakat Indonesia (Aji, A & Irianto, R. D, 2017).

Kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan berbanding terbalik satu sama lain dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan kedalam pemanfaatan tertentu untuk manusia beraktivitas (Prabowo, 2018).

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah (Widjanarko, dkk, 2006). Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif (Hidayat, 2012).

Kabupaten Sleman juga menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terbesar di Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menyebabkan struktur

demografi Kabupaten Sleman bertransformasi dari pedesaan menjadi perkotaan. Hal ini menyebakan permintaan akan lahan industri dan pemukiman meningkat karena lokasi tersebut dekat dengan pusat kota. Atau dapat dilihat

Tabel 1.1

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2000-2019

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)		
	2000	2010	2019
Kulon Progo	370.944	388.869	430.220
Bantul	781.013	911.503	1.018.402
Gunungkidul	670.433	675.382	742.731
Sleman	901.377	1.093.110	1.219.640
Yogyakarta	396.711	388.627	431.939
D.I. Yogyakarta	3.120.478	3.457.491	3.842.932

Sumber : BPS D.I. Yogyakarta, 2020

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah di Kecamatan Minggir pada tahun 2000-2020?
2. Mengetahui perubahan penggunaan lahan sawah menjadi lahan non sawah di Kecamatan Minggir antara tahun 2000, 2017 dan 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membuat peta sebaran sawah tahun 2000, 2017 dan 2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah di Kecamatan Minggir pada tahun 2000, 2017 dan 2020.

3. Analisis pola perubahan penggunaan lahan sawah menjadi lahan non sawah di Kecamatan Minggir pada tahun 2000, 2017 dan 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mendapatkan data penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian STIPER Yogyakarta dan diharapkan dapat berguna untuk menjadi refrensi pada penelitian sejenis.